

PANCASILA, NU DAN JALAN KEBUDAYAAN

Asep Salahudin

*Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM
Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.
Ketua Lakpesdam PWNJ Jawa Barat.*



Pancasila tentu saja bukan sekadar falsafah dan ideologi mengawang, tapi harus fungsional dan nyata kontribusinya bagi politik harian kebangsaan. Pancasila menjadi jalan kebudayaan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang meliputi kemerdekaan, bardaulat, adil, dan makmur. Di sanalah sebenarnya klaim kesaktiannya semestinya diletakkan. Manakala diturunkan dari sila menjadi tindakan nyata, dari abstraksi menjadi aksi, dari ortodoksi menjadi ortopraksi. Justru di pusran ini pula Pancasila seringkali hadir dengan ketegangan yang tak pernah terselesaikan: antara normativitas dan historisitas Pancasila senantiasa berjarak. Antara dogma dan fakta tidak pernah ada upaya serius untuk didekatkan.

Gempita perayaan hari lahir Pancasila dan semangat menengok

kembali Pancasila, semestinya menjadi awal bukan saja tentang keniscayaan terus mengaktifkan ingatan kolektif bahwa kita punya ‘mukjizat’ Pancasila, namun juga bagaimana ingatan itu menjadi peristiwa sosial dan dinamika bernegara yang menggerakkan kita agar tidak pernah bosan melakukan tindakan-tindakan utama untuk kebaikan bersama (*public good*), untuk memastikan bahwa trajektori bernegara tidak menyimpang dari tujuan semula yang telah dirumuskan para pendiri bangsa.

Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar metafisis bagaimana nilai-nilai ketuhanan menjadi pandu untuk mempercepat bangsa menemukan

adabnya. Ketuhanan yang ditarik satu helaan nafas dengan kemanusiaan. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno tempo hari mengusulkannya bukan “Ketuhanan Yang Maha Esa” tapi “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”.

Dengan sila itu, Bung Karno bermaksud menegaskan bahwa persoalan ketuhanan adalah hal asasi yang menjadi keyakinan personal sekaligus tidak menutup mata dari realitas pluralisme sebagai sebuah takdir yang tidak bisa dan tidak perlu ditampik. Bahwa berketuhanan tidak otomatis manganulir liyan, tapi sebaliknya semakin menebalkan sikap terbuka menerima keliyanan sebagai bagian ontologis untuk memperkokoh kekitaan. Keliyanan sebagai alasan kehadiran kita. Aku dan kamu yang diikat dalam spirit kekitaan bukan sekadar relasi sosial tapi pantulan transendental panggilan suci Tuhan. Inilah yang dibilang filsuf religius neo-socratisme, Gabriel Marcel, betapa hubungan kemanusiaan itu harus dilandaskan di atas garis kudus ketuhanan, *Toi Absolu*. Tuhan sebagai landasan metafisis dari persekutuan manusia. Relasi dengan liyan selalu mengandung arti ”ada bersama”, *esse est co esse*.

“...nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannya mengasih tempat cinta pada lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya udara, yang mengasih tempat pada segenap sesuatu yang

perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup ... nasionalisme yang membuat kita menjadi ‘perkakasnya Tuhan’ dan membuat kita menjadi ‘hidup dalam roh’ ...”

Soekarno dengan visioner menempatkan agama (Islam) pada kedalaman sumur spiritualisme (api) dan negara adalah lain sisi yang tidak semestinya mengurus salah satu agama saja sebagaimana agama salah kaprah kalau melakukan intervensi terhadap urusan profan negara.

“... Agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya supaya menjadi subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus pemerintah tetapi justru diurus oleh pemerintah. Umat Islam terikat kaki-tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintahan. Hal ini adalah suatu halangan besar sekali buat kesuburan Islam di Turki dan bukan saja di Turki, tetapi di manamana saja, karena pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ menjadikan ia satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan.”

Ketuhanan berkebudayaan menjadi sebuah kalimat dengan imajinasi luhur bahwa bangsa besar hanya akan diraih manakala masyarakatnya mampu menanggalkan egoisme beragama. Soekarno yang lahir dari seorang ibu Bali (Hindu), Bapak (Islam-Jawa) dan dalam

asuhan Sarinah (sosialisme) sadar sesadar-sadarnya bahwa realitas kebangsaan yang majemuk sangat rentan terhadap konflik apabila tidak ada falsafah yang menjadi payung bersamanya. Falsafah itu tidak lain adalah “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”.

Bahwa “ketuhanan” agar bermakna harus dibumikan dalam ranah kebudayaan. Sebagaimana kebudayaan agar memiliki visi terang dan berjangka panjang harus diacukan pada haluan nilai-nilai ketuhanan dan kedalaman iman yang menggetarkan.

Kebudayaan bukan saja melulu berbicara hal teknik, namun juga bersentuhan dengan persoalan mistik seperti pernah dibilang van Peursen dalam “Strategi Kebudayaan”.¹ Maka secara kultural dalam kosmologi Sunda, misalnya, hubungan antara *jatiniskala*, *niskala* dan buana *pancatengah* itu sangat cair. Antara yang gaib dan hadir bisa saling bertukar tempat. *Alimilghaibi wasy syahadati*. Pengetahuan yang menembus batas kegaiban dan kenyataan.

Ketuhanan ketika dilepaskan dari anasir kebudayaan, akan nampak kering dan akhirnya tersekap dalam percakapan serba masa silam dan

involutif. Kemudian masa silam itu dipercaya sebagai serangkaian peristiwa yang harus diterapkan hari ini. Di titik ini biasanya awal mula paham kaum puritan tersemay. Puritanisme salah satunya ditandai dari kecenderungan memahami agama dilepaskan dari budaya yang mengitarinya. Puritanisme sibuk menghardik persoalan kekinian sambil terus menjadikan masa lalu sebagai rujukkannya secara tidak kreatif. Manusia bukan dibawa ke masa depan, tapi dihunjamkan dalam limbo masa silam.

Kapan puritanisme berubah menjadi radikalisme yang menghalalkan tindak kekerasan? Jawabannya, persis terjadi ketika kaum puritan itu tak punya kesanggupan membaca kebudayaan manusia hari ini secara imajinatif. Persoalan demokrasi, hak asasi manusia, multikulturalisme, gender, dan tema-tema lainnya dicarikan jawabannya dari teks masa silam yang ditafsirkan secara harfiah. Akhirnya yang keluar adalah fatwa haramnya demokrasi, liyan yang berbeda keyakinan dipandang kafir, Pancasila sebagai *thagut*, perempuan yang tak pakai cadar sebagai kemunkaran, dunia dibelah dalam kategori dikotomik fikih skolastik-abad pertengahan sebagai *darul Islam* (negara Islam) dan *darul harbi* (negara musuh yang wajib diperangi).

Sebaliknya, kebudayaan juga akan menampakkan raut gersang ketika unsur-unsur sakralitas ilahiah diabaikan. Kebudayaan dipahami hanya melulu urusan kuliner, tempat wisata,

1 Lihat Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisus, 1988). Bandingkan dengan Gad Barzilai, *Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities* (University of Michigan Press, 2003) dan Anthony P Cohen, *The Symbolic Construction of Community*. (Routledge: New York, 1985).

dangdutan, dan lainnya. Ketika yang mistik hilang dari rongga teknik maka kebudayaan (dan peradaban) itu akan keropos dan banal. Kehancuran sebuah bangsa selalu dimulai saat kesadaran ketuhanan (moralitas) mengalami defisit.

Kemakmuran, capaian kuantitatif ekonomi, prestasi material yang tak melibatkan keinsafan ketuhanan, tak ubahnya, dalam mitologi Yunani, Faust. Sosok yang mampu membangun tapi dia membakar dirinya dengan api yang dinyalakannya sendiri. Seperti pernah ditulis Georg Lukacs dan Herbert Marcuse bahwa penindasan itu yang paling mengerikan bukan karena penindasan ekonomi dan politik, tapi keterasingan dari hakikat dirinya yang bikin seseorang merasa tertindas dan akhirnya selalu merasa hampa dan ujungnya melakukan (bom) bunuh diri. Erich Fromm juga dalam *Psychoanalysis and Religion* telah menengarai tentang capaian-capaian keindahan material. Namun, ketika perhatian akan tujuan hidup hilang, akhirnya yang terjadi rapuhnya persaudaraan, hilangnya kebahagiaan, dipercayainya berita *hoax*, tumbuhnya saling curiga.²

Sebuah bacaan cerdas Soekarno, sebab si Bung Besar mengalami sendiri dan melihat bangsa-bangsa lain yang cerai berai karena dipicu sengketa teologis kekanak-kanakan, pemantiknya seringkali adalah metafisika kebencian

karena salah kaprah dalam menafsirkan senarai firman Tuhan dan sesat pikir ketika memaknai kebangsaan kaitannya dengan keagamaan. Soekarno mampu melampaui sentimen eksklusif keagamaan dan menawarkan visi keagamaan dan kebangsaan yang lapang.

Soekarno seakan dibimbing “wahyu” bahwa bangsanya yang baru saja keluar dari sekapan kaum kolonial dalam waktu sekejap akan berubah menjadi medan pertumpahan darah karena kontestasi keagamaan dan politik identitas yang hendak dipaksakan menjadi bagian integral dari batang tubuh kenegaraan. Kata Bung Karno:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri...Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan yakni, dengan tiada ‘egoisme agama’.”

Ketuhanan menjadi awal melakukan penghayatan iman yang intim. Iman inklusif yang menjadi “modal sosial” bagi terwujudnya persekutuan terbuka sekaligus *counter culture* atas segala perilaku menyimpang. Pancasila sebagai agama sipil (Robert Bellah) dan kebenaran yang lahir dari masyarakat (Jean-Jacques Rousseau). Pancasila sebagai “*mitsaqan ghalidha*”, kontrak sosial yang tidak boleh dikhianati siapa pun juga. NU dalam

2 Lihat Fromm, Erich. *Psychoanalysis and Religion* (New Haven, CT, United States: Yale University Press, 1950); lihat juga Jensen, Walter A. “Humanistic and authoritarian religions.” In *Erich Fromm's contributions to sociological theory*. (Kalamazoo, MI: Printmill, pp).

Muktamar 1984 menyebutnya sebagai bentuk final bernegara.³

NU Membaca Pancasila

Nalar Bung Karno tentang Pancasila, sebangun dengan konstruksi logika ketika NU menjadikan Pancasila sebagai ideologi final. Dalam Khittah NU seperti dikatakan KH. Achmad Siddiq, *“Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 (bil lafdhi wal ma’nal murad), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah.”*⁴

Salah seorang arsitek yang mentahbiskan Pancasila sebagai ideologi final itu tentu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di mata Gus Dur ada kesamaan subsansial Islam dan Pancasila, yakni keduanya sama-sama mengusung kewajiban menjunjung tinggi kehormatan manusia sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima Pancasila. Keduanya mempunyai perhatian penuh memuliakan marwah kemanusiaan dan aspek

maqasyid asy-syariah lainnya.

Pancasila harus mengembangkan wawasan kehidupan yang demokratis, menganut paham perlakuan sama di muka hukum secara tuntas, menghargai kebebasan berpendapat dan menjamin kebebasan berserikat. Inilah kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi negara. Kunci ini diperoleh dari lima jaminan dasar yang diberikan oleh hukum Islam kepada masyarakat: jaminan keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi.⁵

NU tidak begitu saja menerima Pancasila, tapi semua itu dilakukan dengan menyelesaikan aspek fikih dan ushul fikihnya terlebih dahulu. Dalam Munas NU itu juga disimpulkan, “Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.... Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.” Atau dalam narasi Abdurrahman Wahid:

“Pendekatan serba fikih atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU

3 Lihat Asep Salahudin, *Agama, Budaya dan Simbol*, makalah Seminar di Universitas Kristen Maranata, 5 Oktober 2017. Driyarkara mengistilahkannya dengan membudaya dan membudayakan Pancasila dan untuk itu ada tiga metode yang harus diterapkan (1) berpikir tentang Pancasila melalui pengalaman sehari-hari; (2) membatinkan Pancasila, dan; (3) menjalankan Pancasila secara dialektis. Lihat Driyarkara, *Karya Lengkap Driyarkara* (Jakarta: Geamedia Pustaka Utama, 2006)

4 Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syariat dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama* (Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), cet. II, hlm. 71.

5 Abdurrahman Wahid, *Islam, Ideologi, dan Etos Nasional Indonesia, dalam Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1988), hlm. 20

relatif lebih mudah menerima ketentuan tentang asas pancasila dalam kehidupan organisasi.. dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan oleh hukum fiqih, NU mampu melakukan sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara modern, juga sering merupakan hambatan bagi pemegang pemerintahan... Namun, itu tidak berarti jalannya pemerintahan lalu terlepas sama sekali dari kendali keagamaan. Bahkan oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan kepada ketentuan fikih.⁶

Ini juga nampaknya yang menjadi latar belakang Gus Dur menolak secara tegas konsep negara Islam. Islam sama sekali tidak memiliki konsep kenegaraan, sehingga ketika Pancasila dihadirkan maka Pancasila melambangkan tentang keislaman itu sendiri. Minimal empat argumen pokok yang disampaikan Gus

Dur. *Pertama*, secara teologis tidak ada satu pun ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang dengan tegas menyebut istilah negara Islam atau seruan kewajiban kepada umat untuk mendirikan negara Islam; *kedua*, secara historis tidak pernah ditemukan sebuah mekanisme baku tentang suksesi kepemimpinan dalam tradisi politik Islam; *ketiga*, secara sosiologis telah berjalan di banyak negara muslim pemerintahan dengan menggunakan sistem yang berbeda satu sama lain dan semuanya mengaku Islam atau Ibnu Taimiyyah menyebutnya *ta'addudul aimmah* (satu Islam dengan banyak wajah pola negaranya); *keempat*, secara kultural budaya setempat seringkali memberikan pengaruh besar terhadap Islam termasuk ketika merumuskan sistem bernegara. Dengan demikian, Islam lebih tepat dikatakan jalan hidup (*syari'ah/thariqah/sabil/sbirath*) yang tidak memiliki konsep negara.⁷ Bagi Gus Dur, upaya formalisasi syariat Islam melalui negara bertentangan dengan etos demokrasi karena cara seperti ini otomatis menempatkan hubungan warga dalam posisi diskrimatif. Non muslim sebagai kelas dua dan muslim superior. Padahal dalam demokrasi dan negara republik warga bersifat setara.⁸ Islam dan negara didudukkan dalam hubungan fungsional demi terimplementasinya kebaikan universal dan agama dihadirkan lebih

6 Abdurrahman Wahid, *NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini*, dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 157-159. Bahkan Gus Dur juga menyimpulkan bahwa kaitan Pancasila-Islam bukan hubungan yang saling mengganti tapi komplementer. "Dalam keadaan demikian, maka agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara, atau dengan kata lain sumber bagi Pancasila, di samping sumber-sumber lain. Ini adalah hubungan inti antara Islam dan Pancasila. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut: agama berperan memotivasi kegiatan individu, melalui nilai-nilai luhur yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa."

7 Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hlm. 95. Dan Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 81.

8 Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 169.

sebagai kekuatan moral dan *counter culture* bukan ideologi tertutup, kedap kritik dan indoktrinatif.⁹

Muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada 1 Rajab 1415 H/ 4 Desember 1994 M, NU mengeluarkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama No. 02/MNU-29/1994 yang banyak mempercakapkan nilai-nilai kebangsaan, tanggungjawab kenegaraan, interaksi rakyat dan penguasa termasuk juga mempercakapkan keumatan dalam konteks penguatan masyarakat sipil dan ruang publik keadaban.¹⁰

9 Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 169.

10 Muktamar ke-29 di Cipasung di antaranya menelorkan “Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan dalam Pandangan Nahdlatul Ulama” meliputi: (1) Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara -di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan “realitas kehidupan” yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanatNya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu; (2) Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat; (3) Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (umara’) dan ulama -sebagai pengembal amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut; (4) *Umarah* dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengembal tugas khilafah dalam arti menjadi pengembal amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan

Spirit kemanusiaan

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi jangkar inti bahwa memuliakan hak asasi manusia adalah melekat dalam diri setiap warga sebagai suatu kewajiban. Kemanusiaan tidak saja harus dimuliakan, namun juga diperlakukan secara adil dan beradab. Sila kedua mengandaikan sebuah pemaknaan bahwa manusia tercipta dalam khittah yang sama. Di antara warga bangsa tidak ada yang lebih tinggi, maka tidak boleh terselip muslihat mendominasi. Semua memiliki kedudukan tidak berbeda baik dalam hukum, politik, sosial termasuk kesempatan memperoleh asupan ekonomi. Jauh sebelum Pancasila dirumuskan Hatta menyampaikan pidatonya sebagai ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda pada 17 Januari 1926.

“Aku telah menyebutkan bahwa imperialisme Barat harus disudahi untuk kepentingan kemanusiaan dan setiap bangsa yang terjajah mempunyai kewajiban untuk memerdekakan diri. Dan karena itu Indonesia harus mencapai kemerdekaannya atas dasar

seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa’: 59)

kemanusiaan dan peradaban. Dan aku kuatir bahwa satu-satunya jalan untuk melaksanakan itu ... tidak lain kekerasan”

Roh Persatuan

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga menyuntikkan keinsafan pentingnya kerukunan, persatuan dan kesatuan. Republikanisme menjadi rute pilihan bernegara. Re-publik: publik sebagai tempat kembali seluruh kebijakan yang diambil pemerintah(an). Hatta dalam *Ke Arah Indononesia Merdeka* menulis:

”Indonesia Merdeka haruslah suatu Republik, yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat, atau Badan-badan Perwakilan. Pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh badan-badan perwakilan rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan.”

Indonesia negara berdaulat. Kohesivitas sosial dibangun sebagai upaya pengokohan bahwa keragaman itu diikat dalam kesamaan cita-cita: keindonesiaan yang bhinneka tunggal ika.

Heterogenitas bukan untuk diseragamkan, tapi disikapi secara lapang. Keragaman sebagai modus eksistensial kelahiran setiap kita, keberadaan kita baik sebagai umat

ataupun bagian dari bangsa. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 menjadi dokumen jejak politik yang menggambarkan bagaimana manusia pergerakan itu sejak awal telah bersepakat tentang tanah air, bahasa dan bangsa yang satu.¹¹

Sila keempat membayangkan sebuah pemosisian rakyat sebagai subjek dalam seluruh kebijakan yang diambil negara. Rakyat pemilik daulat. Sila keempat juga memberikan sebuah pemahaman tentang hadirnya rasio deliberatif ruang publik di mana setiap warga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya dengan bebas, mendahulukan akal sehat dan tetap memperhatikan kearifan lokal, musyawarah mufakat. “Demokrasi

11 Sumpah Pemuda dalam konteks kebangsaan penuh rajah sebab sumpah itu di kemudian hari bertemali dengan peristiwa politik yang bikin Indonesia ”hamil tua”, kemerdekaan yang menjadi cita-cita bersama 17 tahun kemudian diproklamasikan Soekarno dan Hatta. Teks Sumpah Pemuda dan teks proklamasi menjadi saudara kembar yang dipertalikan oleh kesamaan visi keindonesiaan. Yang membedakan hanya pilihan diksi, Sumpah Pemuda lebih serupa puisi karena memang dibikin penyair soneta Mohammad Yamin, sementara proklamasi mendekati kepada gaya prosa. Puisi Sumpah Pemuda mengilhami prosa proklamasi. Dari sumpah verbatim kemudian menjelma tindakan-tindakan politik praktis kaum pergerakan. Dalam telaah Sutardji Calzoum Bachri, ”Saya ingin menampilkan teks Sumpah Pemuda sebagai teks puisi karena selama ini teks Sumpah Pemuda itu melulu dilihat sebagai teks sosial politik. Padahal, teks itu menampilkan mimpi atau imajinasi dengan bahasa ringkas hemat, padat, kuat menyaran makna, dengan irama dan pengulangan kata-kata yang bagaikan mantra.” Di titik ini kekuatan kata-kata memberikan kontribusi terhadap nyawa bangsa. Dalam sajak Subagio Sastrowardoyo: asal mula adalah kata/jagat tersusun dari kata/di balik itu hanya/ruang kosong dan angin pagi. Kata menjadi rumah eksistensial kebangsaan seperti kata Martin Heidegger the house of being. Dalam syarah Jean Paul Sartre, *J'ai commence mau vie vomme je la finirai sans doute: au milie des livres. Lihat, Asep Salahudin, Setelah Pemuda Bersumpah, Kompas, 29/10/2014*

Pancasila” menjadi kunci dalam cara bernegara.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi target bernegara. Keadilan seadil-adilnya. Kemakmuran semakmur-makmurnya. Bung Hatta menafsirkan sila kelima sebagai “keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur.” Dasar religiositas (Ketuhanan Yang Maha Esa) adalah risalah tergelarnya keadilan bagi semesta. *Innallahu ya'muru bil adli wal ihsan*. Keadilan sebagai bentuk *justice is done when equals are treated equally* (Aristoteles), proses pengendalian diri (Plato) sekaligus dibimbing oleh pemerintah yang mempunyai kewajiban melekat bikin keadilan yang tegak lurus dengan kebenaran (Socrates).

Narasi Digali

Seperti dicatat sejarah bahwa Pancasila digali dari kearifan budaya lokal dan nilai-nilai agama yang berkembang di negeri kepulauan. Pancasila diambil dari proses silang berbagai kebudayaan, budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam) dan kepercayaan lainnya yang tersebar di Nusantara. Lewat kecerdasan para leluhur kemudian dirangkum menjadi lima sila setelah melalui perdebatan alot di Gedung Konstituante.¹²

12 Perdebatan Pancasila di sidang Konstituante lihat Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta, LP3ES, 2006) dan Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia

Pancasila seperti yang ditahbiskan Bung Karno sebagai *philosophische grondslag* itulah fundamen falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”. Muhammad Yamin dalam “Proklamasi dan Konstitusi” (1951) mengatakan hal yang tidak jauh berbeda bahwa, “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.

Dalam ungkapan Goenawan Mohamad:

”Kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan rumusan yang ringkas dari ikhtiar bangsa kita yang sedang meniti buih untuk dengan selamat mencapai persatuan dalam perbedaan.... Kita membutuhkan Pancasila kembali untuk mengukuhkan, kita mau tak mau perlu hidup dengan sebuah pandangan dan sikap yang manusiawi—yang mengakui peliknya hidup bermasyarakat. Kita membutuhkan Pancasila kembali karena merupakan proses negosiasi terus-menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa ”eka, dan tak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan, dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Maha Benar. Kita membutuhkan Pancasila kembali: seperti saya katakan di atas, kita

hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidaksempurnaan nasib manusia.”

UKP PIP yang dibentuk pada 2017 menegaskan kembali bahwa Pancasila akan tetap memiliki relevansi dengan persoalan bangsa, justru ketika kita sebagai bangsa sedang menghadapi berbagai permasalahan mulai dari fantasi ideologi yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Ormas-ormas yang kian beringas, serbuan gaya hidup hedonistik, godaan kapitalisme yang mengepung dari berbagai sudut, demokrasi transaksional, intoleransi, diskriminasi, ketimpangan, neoliberalisme yang mengancam demokrasi, keberagaman yang kian tertutup atau multikulturalisme yang dimaknai secara sempit.

Memonopoli Penafsiran

Kesalahan Orde Baru yang paling fatal adalah nafsu memonopoli tafsir Pancasila. Tabiat seperti ini tidak boleh terulang lagi kecuali kita berniat kembali ke zaman “jahiliah” lagi. 32 tahun negara despotik yang dipimpin Jenderal Soeharto dengan mesin politik Golkar salah satu caranya adalah menjadikan Pancasila sebagai basis legitimasi secara sepihak atas seluruh tindakan politiknya, atas semua praktik ekonomi yang diterapkannya. Pancasila kemudian menjadi sangat tertutup karena di belakangnya aparatus negara siap melibas siapa pun warga negara yang mencoba memaknainya secara berbeda

dengan tafsir resmi negara. Pancasila hanya menjadi “alat” pembungkam suara-suara yang berseberangan dengan kekuasaan. Pancasila kokoh secara vertikal tapi sama sekali tidak pernah memberikan pelayanan secara horizontal

Kata Goenawan Mohamad, ada tiga kesalahan besar ‘Orde Baru’ dalam memandang kelima ‘prinsip’ itu. Yang pertama adalah membuat Pancasila hampir-hampir keramat. Yang kedua, membuat Pancasila bagian dari bahasa, bahkan simbol eksklusif, si berkuasa. Yang ketiga, mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan. “Orde Baru telah memperlakukan Pancasila ibarat Rahwana mengambil-alih Sitaselama bertahun-tahun. Analogi dari epos Ramayana ini tak sepenuhnya tepat, tapi seperti Sita setelah kembali dibebaskan oleh Rama, Pancasila di mata orang banyak, terutama bagi mereka yang tertekan, setelah ‘Orde Baru’ runtuh, seakan-akan bernoda: ia tetap dikenang sebagai bagian dari lambang kekuasaan sang Rahwana.”¹³

Tentu zaman gelap seperti itu Pancasila diletakkan bukan pada sejauhmana Pancasila itu memberikan sumbangan nyata bagi terwujudnya kesejahteraan, tapi pada gemuruh seremonial. Pancasila yang sakti hanya ada pada level penataran, upacara dan pidato verbalistik. Pancasila dilucuti elan vital dan imperatif moralnya, dan yang tersisa hanya sebatas monumen dan perayaan.

13 Goenawan Muhammad, *Menggali Pancasila Kembali*, 11 September 2005